



BELAJAR DARI PROSES KAJIAN KOLABORATIF RANTAI NILAI SUTRA

OLEH: **NURHADY SIRIMOROK**

Anggota Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sulawesi Selatan



Pada Juli 2020 hingga Januari 2021, sekelompok peneliti mengerjakan kajian tentang rantai nilai (*value chain*) komoditas sutra Sulawesi Selatan. Tim peneliti ini menjalankan satu bagian dari program rintisan penyusunan kebijakan berdasarkan pengetahuan atau *Knowledge to Policy Pilot* (K2P), kerjasama antara Knowledge Sector Initiative (KSI), Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan BaKTI, dan SRP Payo-Payo.

Selain berupaya membangun proses perumusan kebijakan yang bersandar pada hasil kajian, K2P juga ingin mendorong keterlibatan banyak pihak dalam proses tersebut. Karena itulah, kajian ini melibatkan peneliti dari organisasi pemerintah daerah (Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan), organisasi non pemerintah (Yayasan BaKTI dan SRP Payo-Payo), dan para akademisi dari Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sebuah kerja kolaboratif senantiasa butuh koordinasi intensif yang dalam kasus kajian ini berlangsung dalam rentang proses yang lumayan panjang—selama enam bulan. Kelambanan respons dari satu pihak saja akan menghambat kelancaran dan keberhasilan kerja kajian.

Pengkajian ini kemudian berhasil membangun rancangan studi yang mengintegrasikan sejumlah kerangka analitis dari beragam perspektif berbeda, dan menyajikan laporan hasil kajian kepada pihak-pihak yang berpotensi membawanya ke proses-proses perumusan kebijakan. Bagaimana semua capaian itu dapat diperoleh?

Tulisan ini menyajikan secara berurutan proses-proses utama dalam pelaksanaan uji coba program penyusunan kebijakan berbasis kajian, sejak rangkaian kegiatan *agenda setting*, pelaksanaan kajian, sampai kerja-kerja advokasi berupa penyajian hasil kajian kepada pihak-pihak terkait dalam upaya mendorong penggunaan rekomendasi kajian menjadi kebijakan. Tulisan ini juga menyajikan sejumlah pembelajaran yang diperoleh dari rangkaian kerja tersebut. Walaupun belum memuat seluruh elemen yang perlu diketahui dalam kajian kolaboratif semacam ini, setidaknya tulisan ini menyajikan aspek dan isu yang paling penting menurut pandangan berbagai pihak khususnya para anggota Tim Pelaksana Kajian (TPK).

AGENDA SETTING: MEMILIH TEMA KAJIAN DAN MEMBANGUN KOMITMEN

Membangun komitmen pemerintah lokal, itulah langkah dan syarat pertama dalam menjalankan uji coba perumusan kebijakan berbasis pengetahuan. Untuk itu, berbagai pihak yang terlibat perlu melewati proses dialog dan negosiasi melalui proses *agenda setting* yang berlangsung lewat lima kali pertemuan antara pihak-pihak terkait. Dari rangkaian inilah pihak-pihak yang terlibat memutuskan untuk mengkaji

dua komoditas: sutra dan talas satoimo, dan menjadikan sutra sebagai prioritas untuk dikaji pada tahun pertama.

Seleksi tema kajian butuh pembentukan kriteria seleksi, dan untuk itu para peserta senantiasa menimbang relevansi isu tersebut dalam beberapa aspek. Pertama, relevansinya bagi masyarakat, yaitu keberadaan sejumlah persoalan nyata dalam tema yang akan dikaji. Kedua, kesesuaian dengan kebutuhan kebijakan, dalam arti pemerintah butuh satu kajian komprehensif untuk menjawab persoalan tersebut yang akan dirumuskan dalam suatu kebijakan, namun kajian semacam itu belum tersedia. Ketiga, kesesuaian dengan prioritas perencanaan pembangunan provinsi, dalam kasus ini tema kajian yang dipilih sesuai dengan isu prioritas dalam RPJMD pemerintah provinsi berjalan. Terakhir, keempat, metode pelaksanaan dan tema kajian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pada pertemuan akhir dari rangkaian ini pula seluruh pihak sepakat untuk menjalankan kajian secara kolaboratif. Kerja kolaboratif K2P ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Bappelitbangda Sulawesi Selatan yang memang sedang mencari jalan untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam pelaksanaan kajian untuk perumusan kebijakan. Selain sebagai ajang pengembangan kapasitas para staf, Bappelitbangda juga membayangkan kerja kolaboratif semacam ini bisa menghimpun perspektif lebih luas. Lebih beragamnya disiplin ilmu dan pihak yang terlibat akan menghasilkan kajian yang lebih bermutu dan komprehensif.

Keanekaragaman pihak yang terlibat selama rangkaian pertemuan *agenda setting* juga merupakan unsur penting dalam membangun komitmen. Sejak pertemuan pertama organisasi pemerintah daerah, akademisi, peneliti, pihak swasta dan ornop sudah terlibat aktif. Rangkaian pertemuan dan kesepakatan ini sangat penting untuk menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap proses K2P, sesuatu yang penting dalam membangun komitmen seluruh pihak yang terlibat. Komitmen ini pada gilirannya akan memudahkan proses kerja pada tahap-tahap selanjutnya.

Sebuah kerja kolaboratif senantiasa butuh koordinasi intensif yang dalam kasus kajian ini



Proses *agenda setting* berlangsung dalam beberapa kali pertemuan antara berbagai pihak yang terkait untuk menyepakati dan mengkaji komoditas yang menjadi prioritas.

berlangsung dalam rentang proses yang lumayan panjang—selama enam bulan. Kelambanan respons dari satu pihak saja akan menghambat kelancaran dan keberhasilan kerja kajian. Apabila itu berlangsung pada tahap awal maka mutu dan bahkan kelanjutan kajian akan terancam, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 ketika pertemuan tatap muka sulit diadakan.

MEMBENTUK TIM PELAKSANA KAJIAN DAN TIM PENGENDALI MUTU

Proses pelaksanaan kajian ini mengadopsi dua aspek mendasar dari Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pertama, mengadopsi istilah 'kajian' untuk menyebut kerja kolaboratif ini. Permendagri No. 17/2006 menyebutkan ragam kegiatan kelitbangan, di antaranya 'penelitian' dan 'pengkajian'. Penelitian didefinisikan sebagai upaya menguji hipotesis menggunakan kaidah akademis, sedangkan pengkajian merujuk pada penelitian terapan untuk memecahkan masalah. Eksperimen ini dengan sengaja memilih istilah pengkajian daripada penelitian, karena tujuan utamanya ialah membantu memecahkan masalah pengembangan komoditas sutra Sulawesi Selatan.

Kedua, kajian ini mengadopsi kelengkapan struktur tim yang terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan kajian, yaitu: Tim Persiapan, Tim Pengawas, Tim Pelaksana Kajian (TPK), dan Tim Pengendali Mutu (TPM). Dalam kajian ini, Tim Persiapan terdiri dari Bidang Litbang Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan BaKTI, sedangkan Tim Pengawas terdiri dari Bidang Litbang Bappelitbangda, Yayasan BaKTI, dan KSI. Sementara itu, TPK berisi sekelompok peneliti yang mengerjakan seluruh rangkaian kerja kajian, dan TPM beranggotakan sekelompok peneliti berpengalaman yang membaca dan memberi masukan-masukan kritis kepada TPK sejak dari rumusan desain sampai laporan hasil kajian.

Sebagai uji coba pelaksanaan kajian kolaboratif, TPK rantai nilai sutra Sulawesi Selatan berisi akademisi, pegiat organisasi non-pemerintah (ornop), dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara TPM berasal dari para akademisi dan pegiat ornop yang punya pengalaman panjang di bidang penelitian, advokasi, dan pengembangan masyarakat.

Akhirnya, pihak-pihak penggagas kajian juga mengambil kesepakatan penting dalam hal pelaksanaan kajian: menjadikan ornop lokal (dalam kasus ini SRP Payo-Payo) sebagai Organisasi Pelaksana Kajian (OPK). Sebagai



Bersama PLT Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. TPK rantai nilai sutra ini berisi akademisi, pegiat organisasi non-pemerintah & staf Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

eksperimen para pihak mencapai kesepakatan ini, menunjuk ornop lokal sebagai pengelola kajian, dengan alasan bahwa ornop lazimnya sudah terbiasa melakukan kerjasama dengan individu dan organisasi yang beraneka ragam. Karena itu, mereka cenderung lebih terbuka bekerja sama dalam tim (kajian) yang berisikan individu yang berbeda latar belakang.

Dalam proses perekrutan dua tim ini, beberapa aspek perlu diperhatikan.

1 Keahlian dan pengalaman anggota tim. Bergantung pada subyek kajian, anggota TPK perlu menguasai aspek-aspek terpenting dari perspektif yang mereka bawa. Anggota tim tidak harus ahli dalam banyak bidang kajian tetapi cukup punya pengetahuan tentang tema yang akan diteliti dari perspektif yang mereka wakili. Dalam kajian rantai nilai komoditas sutra Sulawesi Selatan, misalnya, peneliti yang mewakili perspektif gender perlu menguasai beragam alat analisis dari kajian gender dan dapat menerapkannya kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

2 Keberagaman. Sebuah penelitian untuk kebijakan akan mendapat manfaat besar dengan memilih anggota TPK dan TPM yang berasal dari beraneka bidang ilmu pengetahuan. Setiap isu publik, yang melibatkan

banyak orang di dunia nyata, selalu merupakan fenomena rumit yang sulit didalami secara memadai dari sudut pandang tertentu saja. Keanekaragaman disiplin ilmu anggota TPK memastikan sebanyak mungkin aspek yang melingkupi tema kajian akan diteliti. Sebagai gambaran, dalam penelitian rantai nilai sutra, anggota tim diisi oleh peneliti sutra, gender, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan rantai nilai komoditas.

3 Keanekaragaman membutuhkan keterbukaan untuk menerima pandangan berbeda dari seluruh anggota TPK dan TPM. Khusus bagi TPK, terutama dalam tahap-tahap awal ketika anggota TPK baru mulai mengenali perspektif masing-masing, keterbukaan terhadap pandangan berbeda sangat dibutuhkan agar setiap peneliti bersedia mendengar dan menyerap aspek-aspek relevan bagi kajian yang disampaikan anggota tim lain. Keterbukaan semacam ini tentu bisa diketahui dari jejak rekam para anggota dalam hal bekerja bersama anggota tim peneliti yang berasal dari disiplin ilmu atau kelompok epistemik berbeda.

4 Setidaknya satu orang anggota TPK menguasai sebagian aspek dari tema spesifik yang akan dikaji. Dari pengalaman kajian rantai nilai sutra, keberadaan

seorang anggota yang sudah lebih dua dekade meneliti sutra di Sulawesi Selatan sangat membantu kerja tim sejak penyusunan desain kajian sampai penulisan laporan akhir. Anggota tim semacam ini dapat mengingatkan tentang aspek-aspek tertentu dari tema yang mungkin luput diperhatikan dalam penyusunan desain kajian, semisal menceritakan aspek-aspek historis perkembangan sutra di Sulawesi Selatan untuk dipertimbangkan oleh anggota TPK lain. Anggota ahli seperti ini juga bisa memudahkan menemukan narasumber (yang sudah ia kenal pada penelitian sebelumnya), atau daerah spesifik yang dituju dalam penelitian lapangan (di mana ia sudah pernah meneliti, atau ia rencanakan untuk diteliti berbasis temuan-temuan sebelumnya). Anggota ahli juga bisa memastikan kebenaran penggunaan istilah-istilah spesifik dalam penulisan laporan. Ada banyak kerja yang tak perlu berulang dengan keberadaan anggota ahli.

5 **Setidaknya satu anggota tim perlu menguasai teknik penulisan karya ilmiah dengan baik agar bisa merangkum hasil analisis dari peneliti berbeda.**

MENGEMBANGKAN DESAIN DAN INSTRUMEN PENELITIAN

Berasal dari beraneka bidang dan disiplin ilmu, proses ini perlu melewati beberapa kali curah pendapat dan diskusi untuk merumuskan berbagai aspek dan konsep, serta kerangka metodologis yang akan digunakan dalam kajian. Rangkaian kerja ini dimulai dengan curah pendapat tentang aspek yang perlu diteliti, dalam hal ini aspek-aspek penting dari rantai nilai sutra. Pada tahap ini setiap anggota TPK mengusulkan kerangka analitis yang relevan bagi kajian, khususnya dari pendekatan yang setiap anggota kuasai. Misalnya, peneliti berbasis gender mengusulkan kerangka analisis gender, peneliti ekonomi mengusulkan kerangka analitis ekonomi dari unit-unit usaha di sepanjang rantai sutra.

Setelah itu, TPK mendiskusikan kerangka umum kajian dengan menimbang usulan masing-masing anggota tim, mengambil konsep

dan kerangka pikir yang relevan dari setiap usulan. Kerja ini berjalan seperti menyusun *puzzle*, di mana setiap anggota tim membawa perspektif, konsep, kerangka teoretik masing-masing untuk menyusun satu kerangka kajian yang utuh—bukan membentuk desain-desain penelitian berbeda sebanyak jumlah anggota tim.

Menurut pengalaman TPK, proses ini perlu dihadapi dengan keterbukaan bagi cara berpikir yang berbeda. Proses ini perlu dilakukan dengan tidak menghindari perbedaan pendapat, malah setiap perbedaan perlu dibicarakan agar terjadi kesepahaman akan relevansi dan konsistensi alat analisis dari setiap anggota tim. Diskusi ini juga akan membuat anggota TPK memahami kerangka berpikir anggota tim, yang akan memudahkan komunikasi dalam tahapan-tahapan selanjutnya.

Setelah kerangka umum kajian disepakati, langkah selanjutnya tinggal merumuskan desain kajian secara tertulis dan membangun instrumen penelitian dari desain tersebut. Singkatnya, keluaran dari tahapan ini ialah desain kajian yang logis dan relatif lengkap secara perspektif, dan instrumen penelitian. Di titik ini ada satu pelajaran penting: keanekaragaman dan keluasan pengetahuan anggota TPK bisa menghemat waktu. Kajian ini tidak perlu melewati berbulan-bulan meninjau ulang kepustakaan untuk mengembangkan desain yang melihat tema kajian dari beraneka perspektif.

Instrumen penelitian yang tersusun secara sistematis, jelas dan kontekstual akan memudahkan penelitian lapangan. Daftar pertanyaan, baik dalam bentuk angket survei maupun panduan wawancara mendalam, perlu dirumuskan dalam bahasa yang jelas untuk menghindari kemajemukan tafsiran sehingga menyulitkan anggota Tim mengajukan pertanyaan ketika di lapangan.

Pertanyaan-pertanyaan itu juga perlu dibuat lebih akurat sesuai konteks lapangan. Di sini kajian literatur dan kehadiran anggota ahli yang menguasai aspek-aspek renik dalam tema kajian sangat membantu. Bayangkan bila Anda datang ke seorang petani yang memelihara ulat sutra dan menemukan bahwa ada sangat banyak aspek mendasar yang luput



Setelah kerangka umum kajian disepakati, selanjutnya desain kajian dirumuskan secara tertulis dan instrumen penelitian dibuat.

Anda tanyakan karena Anda datang dengan pertanyaan yang masih relatif umum. Spesifikasi pertanyaan juga membantu dalam proses wawancara. Misalnya, bila seorang peneliti mulai bertanya tentang kegiatan para penenun, dan ia akan sulit memahami jawaban informan karena memakai istilah-istilah lokal yang spesifik. Ini akan menyulitkan peneliti untuk melakukan probing dan menghasilkan kualitas wawancara yang berputar di permukaan isu yang dikaji.

Untuk mengantisipasi persoalan ini, perlu diadakan uji coba terhadap instrumen tersebut. TPK cukup berhasil menghindari persoalan ini dengan mengadakan uji coba instrumen survei maupun wawancara mendalam sebelum melakukan kerja yang sebenarnya. Uji coba ini dilakukan terhadap sekelompok responden dan informan yang tidak akan diwawancarai dalam penelitian.

Catatan penting lain yang perlu diajukan di sini ialah pentingnya sejarah pembentukan jejaring (*networking*) dalam menjaga komitmen para peneliti. Satu contoh, negosiasi kesediaan waktu anggota Tim Pelaksana Kajian untuk menetapkan jadwal lokakarya penyusunan desain kajian, yang butuh beberapa kali pertemuan, bisa berlangsung berlarut-larut bila berjumpa dengan respons lamban karena

kurangnya komitmen terhadap kajian. Proses semacam ini bisa saja menghasilkan desain yang disusun secara terburu-buru pada akhir tenggat oleh sedikit anggota tim. Pada kasus yang lebih parah, proses ini bisa saja berujung kegagalan sebelum memulai kerja penelitian lapangan.

Dalam kasus kajian rantai nilai sutra yang merupakan kajian kolaboratif organisasi berbeda, kehadiran organisasi non-pemerintah yang kuat dalam hal jejaring seperti Yayasan BaKTI akan sangat membantu. Yayasan BaKTI yang berbasis di Makassar telah berpengalaman selama dua dekade melakukan berbagai aktivitas pengelolaan pengetahuan, termasuk kajian untuk kebijakan dan berjejaring dengan para peneliti baik dari dunia akademik maupun para pegiat organisasi masyarakat sipil, juga organisasi pemerintahan di berbagai level, serta mengenal dengan baik seluruh organisasi dan individu yang diajak terlibat dalam kajian ini. Jejaring ini tidak hanya membantu menemukan individu dan organisasi yang paling berkompeten dan relevan untuk mengerjakan kajian, hubungan yang telah terjalin antara pihak-pihak tersebut dengan Yayasan BaKTI memudahkan komunikasi dan koordinasi, baik di sepanjang proses kajian maupun menggerakkan tindak lanjut yang tercipta dari kajian tersebut.

PENGUMPULAN DATA

Kajian rantai nilai sutra Sulawesi Selatan berlangsung lewat penelitian lapangan yang melibatkan wawancara mendalam, survei, pengamatan, dan kajian atas kepustakaan yang dihimpun dari berbagai sumber. TPK mengunjungi tiga kabupaten, mewawancarai puluhan petani, belasan penenun, sejumlah pedagang dan pengusaha, serta perwakilan badan pemerintahan. Proses ini berlangsung selama tiga bulan, Oktober-Desember 2020, dengan jadwal yang fleksibel, di mana peneliti bisa datang bersamaan dengan yang lain, seorang diri, atau dalam kelompok kecil, sesuai kesediaan waktu setiap anggota TPK.

Karena penelitian lapangan dilakukan sebagai kerja tim, koordinasi intensif di antara para anggota tim menjadi sangat penting. Kerja koordinasi ini sangat terbantu oleh kehadiran aplikasi *whatsapp group*, yang memungkinkan seluruh tipe komunikasi berlangsung kapan pun TPK butuhkan. Dari pertukaran *insight* yang tiba-tiba muncul di lapangan, tanya-jawab mengenai logistik dan keberadaan anggota TPK lain, menyepakati tempat dan jadwal bertemu di lapangan, sampai berbagi informasi tentang lokasi dan informan tertentu atau sekadar berbagi foto untuk menjawab pertanyaan anggota Tim lain, seluruhnya bisa berlangsung kapan pun ketika muncul kebutuhan. Model komunikasi ini juga bisa menghindari tumpang tindih pekerjaan (mewawancarai informan yang sama dengan instrumen yang sama), atau sebaliknya kekosongan informasi karena informan kunci tertentu luput diwawancarai.

Pengumpulan data dan dokumen resmi dari organisasi-organisasi pemerintahan daerah, di level kabupaten, bisa menemui kendala karena beberapa hal semisal sistem penyimpanan data yang merumitkan pencarian, volume data yang dibutuhkan cukup besar, atau data memang tidak tersedia namun peneliti menerima respons yang lamban. Di titik ini, kehadiran staf Bappelitbangda dalam TPK, yang mengetahui jalur dan mekanisme permintaan dokumen dari organisasi-organisasi pemerintahan, menjadi sangat penting.

Sementara itu, pengumpulan data dari warga desa akan sangat terbantu oleh kehadiran organisasi yang mengetahui cara-cara efektif

menemukan sumber-sumber informasi dari kelompok masyarakat setempat. Dalam kasus kajian rantai nilai sutra, penelitian lapangan terbantu oleh kehadiran SRP Payo-Payo yang berpengalaman bekerja di desa-desa sehingga cukup tahu bagaimana informasi beredar di pedesaan. Sebagai contoh, menggunakan jaringannya, SRP Payo-Payo meminta bantuan seorang sekretaris desa yang kemudian mengontak koleganya di seluruh kabupaten lewat *whatsapp group* mereka, untuk memberitahu apakah di desa-desa mereka (pernah) ada petani yang terlibat dalam pemeliharaan ulat dan budidaya murbei. Demikian pula, SRP Payo-Payo mengirim tim survei yang terlatih bekerja di desa untuk melakukan survei partisipasi petani dalam budidaya murbei dan pemeliharaan ulat sutra. Cara-cara ini dapat meningkatkan mutu data survei yang dikumpulkan.

Terakhir, keluwesan dalam jadwal penelitian lapangan bagi masing-masing anggota peneliti perlu mendapat perhatian. Para anggota tim peneliti biasanya orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan rutin. Jadwal luang mereka untuk penelitian lapangan biasa berbeda-beda. Keluwesan ini bisa membantu peneliti menetapkan jadwal pribadi untuk kajian ini, dan menyiapkan diri sebelum ke lapangan semisal mengerjakan seluruh pekerjaan lain yang perlu diselesaikan sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang.

PENULISAN LAPORAN, REVIEW, DAN PRESENTASI LAPORAN

Tahapan ini terdiri dari kerja analisis data, penulisan laporan, dan beberapa kali diskusi dengan TPM untuk meminta masukan dan kritik atas hasil sementara kajian. Di sepanjang proses kajian rantai nilai sutra Sulawesi Selatan, TPK melaksanakan melakukan empat kali presentasi kepada TPM untuk mendiskusikan desain dan instrumen penelitian. Ini dilakukan untuk memastikan mutu rancangan dan instrumen penelitian sebelum ke lapangan. TPK kemudian dua kali menyajikan naskah laporan sepulang dari lapangan. Kedua presentasi ini berguna untuk mendengar masukan-masukan TPM untuk revisi laporan.



Tim Pelaksana Kajian bersama dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan.

Di sepanjang tahapan ini beberapa pembelajaran bisa kita peroleh. Pertama, sejak penyusunan desain kajian, sebaiknya draft kerangka (*outline*) laporan sudah dibuat. Di sini, kehadiran staf Bappelitbangda Sulawesi Selatan, atau organisasi pemerintahan sejenis, sangat penting. Mereka biasanya mengetahui secara terperinci *outline* laporan resmi yang sudah dibuat sesuai Permendagri terkait, dan berpengalaman menerapkannya dalam penelitian.

Kedua, lalu lintas informasi akan berseliweran cukup deras dalam tahapan penulisan laporan. Setiap anggota tim akan menyajikan hasil temuan dan analisisnya kepada seluruh tim. Dalam situasi dikejar tenggat, dan dalam kasus ini kesulitan bertemu tatap muka karena pandemi COVID-19, lalu lintas informasi semacam ini berisiko menghasilkan sejumlah hambatan. Hambatan pertama ialah kebingungan di antara anggota tim yang bisa terjadi karena adanya temuan dan analisis yang kontradiktif oleh anggota tim berbeda; atau gaya penulisan laporan yang berbeda karena perbedaan sifat data yang dihimpun, atau perbedaan tradisi penulisan yang akrab bagi anggota tim berbeda. Kebingungan juga bisa muncul karena satu atau lebih peneliti belum sempat merangkum temuan dalam bentuk yang sesuai dengan rumusan poin-poin pertanyaan penelitian.

Soal kedua yang bisa timbul dari lajunya pertukaran informasi ini ialah ketidaklengkapan informasi. Bolongnya informasi bisa terjadi karena sebagian temuan dan analisis spesifik luput dihadirkan ketika dibutuhkan karena tertumpuk oleh informasi lain, penyajinya mungkin sedang berhalangan hadir, atau bisa jadi data yang dibutuhkan memang belum dihimpun secara lengkap.

Isu ketiga yang bisa tercipta oleh tumpukan informasi ialah kesulitan melakukan abstraksi. Dibutuhkan kekayaan kosa kata untuk bisa merangkum temuan dan analisis dari seluruh anggota Tim. Setiap anggota bisa saja menggunakan istilah dan perspektif berbeda, karena itu dibutuhkan abstraksi berupa konsep atau deskripsi analitis yang bisa merangkul keluasan dan keanekaragaman analisis yang disodorkan setiap peneliti.

Untuk mengatasi berbagai isu tersebut dibutuhkan setidaknya satu kali pertemuan langsung, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi. Pertemuan ini sangat penting untuk menghimpun temuan, mendiskusikan kontradiksi-kontradiksi dalam temuan, mengidentifikasi data yang belum dihimpun atau belum dirangkum secara sistematis. Pertemuan ini juga berguna untuk menetapkan agenda kerja selanjutnya serta

membagi pekerjaan. Sebagai contoh, setelah TPK berkumpul di akhir masa penelitian lapangan, mereka menemukan bahwa TPK masih membutuhkan survei pasar untuk menentukan beraneka aspek dari konsumsi produk-produk sutra Sulawesi Selatan. Karena itu, seorang anggota tim segera menyusun angket berbasis *online*. Hasil survei ini akhirnya sangat berguna untuk menjelaskan situasi terakhir sektor hilir rantai nilai sutra Sulawesi Selatan.

Akhirnya, ketiga, tim peneliti sebaiknya menetapkan satu anggota sebagai orang yang merangkum seluruh hasil temuan dan analisis. Hal ini berguna agar alur tulisan, rasa bahasa laporan menjadi konsisten sehingga laporan lebih mudah dibaca. Proses review oleh TPM akan berjalan lebih lancar bila laporan ditulis dengan baik. Diskusi dengan TPM akan lebih banyak membahas substansi hasil kajian daripada kelemahan teknis tulisan. Dengan demikian, TPK akan mendapatkan banyak masukan berharga dari TPM.

MENUJU PEMBENTUKAN KEBIJAKAN

Pada tahap akhir revisi laporan kajian, TPK menyajikan hasil kajian kepada TPM dan pihak-pihak terkait untuk sekali lagi menerima masukan dari perspektif lebih luas—dan sekali lagi merevisi laporan berdasarkan masukan tersebut. Selain untuk menimba masukan, presentasi terakhir ini juga berperan mensosialisasikan hasil kajian kepada lebih banyak pihak, sekaligus membangun rasa kepemilikan mereka terhadap hasil kajian. Sosialisasi ini cukup berhasil mengajak keterlibatan pihak-pihak terkait untuk mendukung penerjemahan rekomendasi kajian ke dalam kebijakan.

Membangun komitmen pihak-pihak terkait lewat presentasi hasil kajian terbukti lumayan berhasil dengan terwujudnya beberapa tindak lanjut dari rekomendasi—setidaknya sampai tulisan ini dibuat. Di dalam pemerintahan provinsi sendiri beberapa rekomendasi hasil kajian seperti pembentukan Gugus Tugas mengembalikan kejayaan sutra Sulawesi Selatan tengah berjalan. SK Gugus Tugas kini sedang menunggu penandatanganan oleh pelaksana tugas gubernur. Demikian pula, rekomendasi penyusunan aturan labelisasi sutra alam untuk melindungi para

penenun dan konsumen juga sedang dibuat. Selain itu, dua kali diskusi bersama Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah berlangsung untuk mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Provinsi menindak-lanjuti hasil kajian.

Dari rangkaian proses ini beberapa hal bisa kita tarik sebagai bahan belajar.

Secara umum, TPK perlu membuat dua jenis presentasi hasil penelitian, mengikuti tujuan masing-masing: penyajian kepada TPM, dan kepada pihak-pihak terkait dalam tindak lanjut kebijakan. Penyajian kepada TPM perlu diiringi dengan pengiriman file lengkap laporan, sejauh yang rampung ketika laporan diserahkan kepada TPM. TPK juga perlu membuat bahan tayang (bisa dalam bentuk *power point presentation* atau aplikasi lainnya yang relevan). Karena penyajian kepada TPM lebih bertujuan untuk meminta masukan-masukan kritis atas naskah laporan, bahan tayang yang TPK buat harus dengan lengkap menampilkan poin-poin utama dari analisis dan rekomendasi. Rumusan perlu dibuat dengan jelas dan sistematis agar diskusi bersama TPM lebih banyak membahas analisis temuan dan rekomendasi, serta konsistensi antara rancangan dan kerangka kerja penelitian dengan temuan dan rekomendasi tersebut, ketimbang menghabiskan waktu beraneka pernik tentang teknik penulisan ilmiah.

Sementara itu, presentasi kepada pihak-pihak terkait akan lebih efektif bila dibuat secara ringkas, langsung ke inti persoalan-persoalan paling penting, serta deretan rekomendasi yang paling penting untuk menghadapi rangkaian persoalan tersebut. Bahasanya mesti jelas dan akrab bagi pemirsa umum, sebisa mungkin menghindari konsep-konsep yang hanya dikenali oleh para akademisi dari disiplin tertentu saja. Demikian pula, akan lebih baik bila diagram, tabel, atau bentuk infografis lain yang disajikan juga sudah dalam bentuk yang sudah disederhanakan, menghindari gambar yang memuat sangat banyak variabel hingga pada tingkat yang menyulitkan pemirsa untuk mengikuti dan penyaji menjelaskannya.

Tentu saja, penyajian semacam ini dibuat bukan untuk menyederhanakan persoalan, tetapi untuk menarik minat para pemirsa untuk mengetahui lebih jauh—pada saat mana perincian yang tidak ada dalam bahan tayang bisa dihadirkan oleh penyaji.



Tim bertemu Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Diskusi bersama Komisi B dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Provinsi menindaklanjuti hasil kajian.

Rangkaian presentasi ini tentu belum bisa mendorong terwujudnya seluruh rekomendasi kajian. Kerja advokasi internal dan eksternal pemerintah untuk mendorong hasil kajian menuju kebijakan masih terus berlangsung. Presentasi-presentasi berikutnya mungkin masih akan menyusul.

Akhirnya, perubahan pimpinan, apalagi pucuk pimpinan, dalam organisasi pemerintahan bisa cukup berpengaruh dalam kelancaran upaya pembentukan kebijakan berbasis bukti. Dalam kasus ini, pergantian pucuk pimpinan (gubernur) membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjalin komunikasi dengan pejabat baru demi menyampaikan ulang hasil kajian, berikut rangkaian tindak lanjutnya—baik yang sudah terlaksana maupun yang sedang diusahakan. Sementara perubahan struktur pemerintahan (seperti penggabungan Bappeda dan Balitbangda menjadi Bappelitbangda) tidak dapat dikatakan membawa efek negatif karena saat itu pucuk pimpinan sudah punya pemahaman cukup mendalam terhadap upaya mewujudkan kebijakan berbasis penelitian bermutu.

Untuk mengatasi soal kelembagaan ini, yang bisa menghambat keberlanjutan upaya pembentukan kebijakan, satu atau lebih pihak, pemerintah maupun non pemerintah, perlu secara intensif mengawal tindak lanjut hasil kajian. Dalam kasus ini, Yayasan BaKTI menjalankan peran ini secara intensif. Selain terus mengawal pembuatan kebijakan yang tengah berlangsung, BaKTI sampai saat ini masih terus mengkoordinasikan upaya sosialisasi hasil kajian, baik kepada para pengambil kebijakan maupun masyarakat umum.

Sebagaimana disebut di atas, eksperimen ini masih terus berlanjut, namun sudah banyak pelajaran yang diperoleh dari proses panjang ini. Keberhasilan memilih tema kajian dalam proses *agenda setting*, desain kajian, hasil kajian dan rekomendasi kebijakan yang berhasil dirumuskan, keterlibatan para pihak di seluruh tahapan, dan berlanjutnya upaya untuk menghasilkan kebijakan berbasis pengetahuan, seluruhnya telah menghasilkan pelajaran berharga yang mungkin bisa diterapkan dalam usaha serupa di tempat-tempat lain. ■



Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program **Knowledge to Policy Pilot (K2P)**, Anda dapat menghubungi:

Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia)
 Jl. Daeng Ngeppe 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia
 ☎ (62-411) 832228 / 833383 📠 (62-411) 852416
 ✉ info@bakti.or.id